



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SMP NEGERI 3 LEPAR

LEMBAR SOAL

PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GAZAL

TAHUN PELAJARAN 2024/ 2025

Nama Siswa	:
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 3 Lepar
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas / Semester	: VII / 1 (satu)
Hari / Tanggal	: Kamis / 05 Desember 2024
Waktu	: 09.30 – 11.00
Kurikulum	: Kurikulum Merdeka

Petunjuk :

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian Lembar Jawaban yang disediakan;
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab;
3. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang;
4. Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah;
5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menghitamkan bulatan jawaban;
6. Apabila Anda ingin memperbaiki/mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan penghapus sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurut Anda benar;
7. Periksalah seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas

Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tindak lanjut dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan
 - a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
 - b. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI)
 - c. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
 - d. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. BPUPKI beranggotakan yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu: Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soerooso.
 - a. 60 orang
 - b. 61 orang

- c. 62 orang
- d. 63 orang

3. Badan tersebut di atas mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yaitu
 - a. Sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945
 - b. Pertama tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945
 - c. Sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 1945
 - d. Pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang kedua berlangsung tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 1945
4. Dasar negara, menurut Ir. Soekarno, berbentuk *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Ir. Soekarno adalah sebagai berikut.
 - a. 1). Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2). Kebangsaan persatuan Indonesia
 - 3). Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
 - 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
 - 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - b. 1). Persatuan
 - 2). Kekeluargaan
 - 3). Keseimbangan Lahir dan Batin
 - 4). Musyawarah
 - 5). Keadilan Rakyat
 - c. 1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
 - 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab,
 - 3). Persatuan Indonesia, dan
 - 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan
 - 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - d. 1). Kebangsaan Indonesia
 - 2). Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
 - 3). Mufakat atau Demokrasi
 - 4). Kesejahteraan Sosial
 - 5). Ketuhanan yang Berkebudayaan
5. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Rumusan dasar negara yang termuat dalam Piagam Jakarta, sebagai berikut:
 - a. 1). Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2). Kebangsaan persatuan Indonesia
 - 3). Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
 - 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
 - 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- b. 1). Persatuan
2). Kekeluargaan
3). Keseimbangan Lahir dan Batin
4). Musyawarah
5). Keadilan Rakyat
 - c. 1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya
2). Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3). Persatuan Indonesia, dan
4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan
5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - d. 1). Kebangsaan Indonesia
2). Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3). Mufakat atau Demokrasi
4). Kesejahteraan Sosial
5). Ketuhanan yang Berkebudayaan
6. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPK dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 27 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta., dibentuk bangsa Indonesia untuk
- a. melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir Soekarno dan Moh Hatta.
 - c. mempersiapkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar Negara
7. PPKI yang dibentuk oleh Jepang, beranggotakan 21 orang. Kemudian ditambah anggotanya menjadi 27 orang. Perubahan keanggotaan PPKI memiliki nilai strategis karena
- a. mencerminkan keterwakilan rakyat Indonesia
 - b. Untuk memberi kesan bahwa PPKI bentukan Jepang hilang.
 - c. sebagai masukan oleh seorang opsi Jepang yang bertugasdi Indonesia Timur
 - d. menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda
8. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan ...
- a. dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia
 - b. negara miskin menjadi negara yang kaya dan sejajar dengan negara-negara lain di Eropa
 - c. dari negara kerajaan menjadi negara republik dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia
 - d. negara agraris menjadi negara industri dan sejajar dengan negara-negara lain di Eropa

9. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah
- orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - orang yang akan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan bangsa dan Negara
 - mengelakkan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh demi kepentingan pribadinya
 - mengelakkan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh demi kepentingan pribadi dan golongan
10. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut, kecuali
- Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme
 - Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia
 - Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 - Mementingkan kepentingan pribadi dan golongan
11. Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan
- permufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religious
 - memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah
 - Rapat berlangsung alot karena terjadi perbedaan pandangan antarpeserta rapat
 - M. Hatta menuturkan dalam Memoirnya yang dikutip dalam Buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
12. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 melaksanakan sidang. Keputusan sidang PPKI adalah sebagai berikut.
- Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
 - Melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar Negara
 - Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan.....
- konstitusi atau Undang-Undang Dasar
 - pola kehidupan berkelompok
 - aturan yang dibuat oleh Negara lain
 - Hukum Internasional
14. Sebagai warga negara Indonesia kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada
- mengelakkan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh demi kepentingan pribadi dan golongan

- b. kehidupan yang tertib dan teratur, sehingga akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera.
- c. pamrih atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya agar di sebut pahlawan
- d. acuh tak acuh atau sikap seseorang yang tidak mau tahu tentang cinta tanah air, karena menganggap tidak menguntungkan
15. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi
- a. menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan
 - b. mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - c. semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.
 - d. semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan pribadinya
16. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Disamping hukum dasar yang tertulis terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yaitu.....
- a. Aturan yang dibuat oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat
 - b. aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
 - c. Keputusan musyawarah nasional partai pemenang pemilu
 - d. Keputusan bersama para pemimpin partai politik
17. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa di alinea kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat pernyataan kemerdekaan dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan
- a. usaha keras para tokoh bangsa pada waktu itu
 - b. hasil perjuangan para tokoh meminta kemerdekaan kepada Jepang
 - c. menyerahnya bala tentara Belanda kepada para pejuang
 - d. atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur.
18. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan
- a. sumber cita-cita moral para pendiri Negara agar selalu dikenang sebagai pahlawan
 - b. sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan.
 - c. Keputusan bersama para pemimpin partai politik
 - d. semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan pribadinya
19. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam masa revolusi namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur universal dan lestari. Universal mengandung

arti bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia . nilai lestari, bermakna

- a. mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa.
 - b. tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan
 - c. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan.
 - d. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
20. Alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu....
- a. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
 - b. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
 - c. bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia.
 - d. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
21. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan, dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Seperti ditegaskan dalam alinea
- a. II Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Teks proklamasi Tahun 1945.
 - d. III Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia
- I. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
 - II. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
 - III. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- Alinea ini menunjukkan
- a. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah Negara
 - b. kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan.
 - c. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar,
 - d. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat

23. Kemerdekaaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-citan nasional yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang “merdeka” berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. “Bersatu” menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. “Berdaulat” mengandung makna
- a. mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. sebagai negara, maka Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa, tanpa campur tangan Negara lain.
 - c. Banyak peristiwa sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah
 - d. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah
24. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan atas berkas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonsia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ini bangsa Indonesia menyadari bahwa
- a. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
 - b. Bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
 - c. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 - d. tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
25. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna
- a. adanya kekuatan tunggal dalam Negara
 - b. kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat.
 - c. dominasi kekuatan partai politik pemenang pemilu terhadap kelompok partai politik yang kalah dalam pemilu
 - d. rakyat dapat dengan sewenang-wenang memerintah para penyelenggara Negara sehingga seluruh kebutuhan dan kepentingnya dapat dipenuhi tanpa syarat.
26. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam Pembukaan maka secara yuridis-konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Rumusan Pancasila tersebut adalah ...
- a. *Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan Indonesia, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

- b. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat
- c. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
- d. Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat
27. Mempertahankan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya. Namun yang tidak kalah penting adalah
- mewujudkan isi atau makna dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - mewujudkan keinginan pribadi dan kelompok untuk mempertahankan eksistensi diri dan kelompoknya.
 - Mengadakan kegiatan-kegiatan dengan cara membentuk sebuah lembaga yang bertujuan mencari kelemahan-kelemahan para penyelenggara Negara untuk di informasikan kepada Negara lain.
28. Manusia merupakan bagian dari manusia yang lain. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu,....
- ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang lain yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
 - senantiasa mementingkan keinginannya tanpa melihat kepentingan orang lain
 - bersifat egois, karena berpikiran bahwa yang ia dapatkan adalah semata-mata karena perjuangannya
 - senantiasa berkeinginan memenuhi kepentingan kelompoknya
29. Untuk menghindari berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat diperlukan adanya kaidah atau aturan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tersebut dibuat untuk
- mggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.
 - menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.
 - menghina orang lain akan dihukum pidana
 - disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas
30. Kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat sangat banyak dan bervariasi. Namun, secara umum norma terdiri dari aturan yang dibuat oleh negara dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Norma pada hakikatnya merupakan kaedah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.,dapat diartikan
- aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku.
 - mggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara.

- c. alat pemberian atas perbuatan yang telah dilakukan meskipun kadang dirasa perbuatan itu salah
- d. alasan seseorang akan berbohong, meskipun sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran.
31. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Adalah pengertian norma
- a. kesusilaan
 - b. kesopanan
 - c. hukum
 - d. agama
32. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma kesopanan terbentuk atas kesepakatan bersama, maka
- a. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani
 - b. tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya.
 - c. hukum mutlak diperlukan di suatu negara karena tidak semua hal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam norma kesopanan
 - d. perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
33. Pulang kampung saat menjelang perayaan Idul Fitri, Natal, atau hari besar keagamaan lainnya merupakan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun apabila seseorang suatu saat pada perayaan tersebut tidak pulang kampung, maka masyarakat akan lebih memaklumi karena alasannya tertentu. Lain halnya adat suku Batak, larangan perkawinan dalam satu marga merupakan pelanggaran berat adat suku Batak. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan dengan adat istiadat pada keduanya ada perbedaan yaitu ...
- a. Sanksi terhadap pelanggaran hukum adat tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap kebiasaan
 - b. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat
 - c. Hukum adat memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan kebiasaan
 - d. Barang siapa melanggar hukum adat berarti melanggar kebiasaan
34. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta

melestarkannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama, akan

- a. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani
- b. menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
- c. tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya.
- d. perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

35. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Hukum bersifat memaksa. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari

- a. perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.
- b. hukum mutlak diperlukan di suatu negara karena tidak semua hal yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam norma kesopanan
- c. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum.
- d. tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya.

36. Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi

- a. "Negara Indonesia adalah negara hukum".
- b. "Negara Indonesia berdasarkan atas kekuasaan"
- c. "Negara berdasar pada agama tertentu"
- d. "Indonesia adalah Negara berkembang"

37. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai mahluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain: kecuali

- a. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.
- b. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
- c. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.
- d. alat pemberian atas perbuatan yang telah dilakukan meskipun kadang dirasa perbuatan itu salah

38. Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Menaati norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal itu sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu

- a. Untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.
- b. Memberikan kesempatan penguasa berbuat sewenang-wenang

- c. menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
d. Sebagai alat untuk menindas bagi yang lemah
39. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum adalah
a. negara yang menggunakan hukum, baik tindakan maupun pembetulan atas tindakan negara meskipun tidak membela kepentingan rakyat.
b. negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.
c. Negara yang selalu menghukum rakyat apabila rakyat tidak sejalan dengan keinginan penguasa
d. Penguasa Negara bebas melakukan tindakan apa saja asalkan ada hukum yang mengatur
40. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak
a. Memberikan kesempatan penguasa berbuat sewenang-wenang
b. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur dengan sanksi tegas.
c. Sebagai alat untuk menindas bagi yang lemah
d. Hukum menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban